

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penulisan.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian.....	8
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	12

1.6.	Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
------	-------------------------------------	----

BAB II. KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

2.1.	Pengertian Peralihan Hak atas Tanah	16
2.2.	Peralihan Hak atas tanah melalui Jual Beli Hak atas Tanah	
2.2.1.	Jual Beli Hak atas Tanah menurut Hukum Adat.....	19
2.2.2.	Jual Beli Hak atas Tanah menurut Hukum Nasional/ UUPA.....	27
2.3.	Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah	
2.3.1.	Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	44
2.3.2.	Syarat Sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	48
2.3.3.	Sifat dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	49
2.3.4.	Perbedaan PPJB dan AJB.....	54
2.4.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 877/ Pdt.G/ 2013/PN.Sby.....	55

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

3.1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	63
3.1.1.	Perlindungan Hukum secara Preventif.....	67

3.1.2. Perlindungan Hukum secara Represif.....	69
3.2. Upaya Hukum Para Pihak Jika Wanprestasi.....	70
3.2.1. Gugatan Wanprestasi.....	74
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran.....	79

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW), terjemahan Subekti

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, *tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria*, LNRI Tahun 1960 No. 104, TLNRI No. 2043.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 *tentang Pendaftaran Tanah*, LNRI Tahun 1961 No. 28, TLNRI No. 2171.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah*, LNRI Tahun 1997 No. 59, TLNRI No. 3696.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 *tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, LNRI Tahun 1998 No. 52, TLNRI No. 3746.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989 *tentang Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*.



BAB I
PENDAHULUAN